



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA PERGURUAN TINGGI KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Sidang ke-	: II
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Persatuan Guru Besar Indonesia, Asosiasi Profesor Indonesia, Pengurus Forum Guru Besar dan Doktor Indonesia
Hari/Tanggal	: 17 November 2022
Pukul	: 13.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 2. Masukan dan Rekomendasi untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 Anggota dari 29 Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Prof. DR. MTS. Arief MBA, CPM (Sekjen Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI)) 2. Prof. Dr. Terawan (Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI)) 3. Prof. Dr. Havidz Aima (Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI)) 4. Prof. Dr. Cecep Darmawan (Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI)) 5. Prof. Dr. Ngadino Surip (Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI)) 6. Prof. Dr. Ratlan Pardede (Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI)) 7. Prof. Dr. Zainuddin Taha (Ketua Pembina Asosiasi Profesor Indonesia (API)) 8. Prof. Dr. Anwar Arifin (Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia (API))

9. **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** (Sekretaris Asosiasi Profesor Indonesia (API))
10. **Prof. Dr. H. Djali** (Asosiasi Profesor Indonesia (API))
11. **Prof. Dr. M. Nursadik, MPA** (Asosiasi Profesor Indonesia (API))
12. **Prof. Dr. Muhammad, M.Si** (Asosiasi Profesor Indonesia (API))
13. **Prof. Dr. Nurliah, M.Si** (Asosiasi Profesor Indonesia (API))
14. **Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D** (Ketua Tim Forum Guru Besar dan Doktor Indonesia)
15. **Prof. Syamsul Rijal** (Forum Guru Besar dan Doktor Indonesia)
16. **Prof. Syaiful Anwar** (Forum Guru Besar dan Doktor Indonesia)
17. **Prof. Janna Suberman** (Forum Guru Besar dan Doktor Indonesia)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.20 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari **Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI)**, **Asosiasi Profesor Indonesia (API)**, **Forum Guru Besar dan Doktor Indonesia** dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber dari **Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI)**, **Asosiasi Profesor Indonesia (API)**, **Forum Guru Besar dan Doktor Indonesia** yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Perguruan Tinggi (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. **Persatuan Guru Besar Indonesia**

- a. Dominasi akreditasi C dan Baik indikasi kualitas Perguruan Tinggi masih rendah.
- b. Persentase Program Studi Akreditasi A dan Unggul kecil dibandingkan B dan Baik Sekali, C dan Baik.
- c. Masih Kecilnya persentase Guru Besar yang hanya kurang dari 2%.
- d. Masih banyaknya Dosen bergelar S2.
- e. Masih sedikitnya Prodi S3 di Indonesia sehingga menghambat akselerasi jumlah Doktor dan berimplikasi menghambat jumlah Guru Besar.

- f. Meminta kesamaan hak politik bagi Dosen ASN agar diberikan kesempatan menjadi Calon Legislatif atau Pilkada tanpa harus mundur terlebih dahulu kecuali terpilih.
- g. Perlu ditinjau ulang peraturan baru yang mempersulit sertifikasi dosen karena harus mengikuti ujian TKDA, TPA dan Toefl tanpa memperhitungkan jenjang kepangkatan dan jenjang pendidikan.
- h. Guru Besar diharapkan bisa memiliki 2 home base agar bisa diakui untuk akreditasi.
- i. Masih ada diskriminasi Dosen antara NIDK dan NIDN yang belum bisa diberikan kewenangan akademik sehingga tidak dapat dihitung untuk akreditasi.

2. Asosiasi Profesor Indonesia

- a. Permasalahan pendidikan yang paling krusial yaitu dana pendidikan masih kurang sehingga perlu perjuangan penambahan anggaran pendidikan sebagai investasi negara Indonesia untuk masa depan.
- b. Kondisi dan tantangan pendidikan di Indonesia masih terlambat 50 Tahun, Daya Saing Rendah, Lemahnya Daya Saing Digital dan Modal Manusia, Gaji Rendah, Rendahnya Budaya Literasi, dan Kekurangan Dosen dan Peneliti.
- c. Perlunya mengganti nomenklatur S1, S2, dan S3 menjadi Sarjana, Magister, dan Doktor agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Masukan dan rekomendasi yang disampaikan diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Perlu revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan melibatkan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) dengan harapan mengakui keberadaan PTKL sebagai salah satu bentuk perguruan tinggi yang memiliki corak pendidikan kedinasan maupun non kedinasan.
 - 2) Mendefinisikan kembali "Pendidikan Kedinasan" sesuai dengan yang terjadi selama ini.
 - 3) Ruang lingkup keilmuan PTKL tidak dibatasi menjadi harus "teknis dan spesifik".
 - 4) Perlu Penguatan otonomi perguruan tinggi.
 - 5) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lebih cocok untuk pendidikan vokasi, jika pendidikan akademi akan melemahkan keilmuan di bidang ilmu.
 - 6) Perlu diberikan kesamaan hak untuk PTN BH dan PTS Unggul dalam membuka program studi.

3. Forum Guru Besar dan Doktor Indonesia

- a. Permasalahan Dosen
 - 1) Sulitnya mengurus sertifikasi dosen, sebaiknya tahapan dan distribusinya lebih tertata.

- 2) Mendorong proses kenaikan pangkat lektor dan guru besar sebaiknya kembali pada pedoman tahun 2014 yakni hanya diwajibkan menulis di jurnal bereputasi internasional, bukan scopus.
- b. Permasalahan Pembiayaan Perguruan Tinggi, kurangnya anggaran, masih dibagi dengan PT kedinasan, kurangnya biaya riset, dan belum mendukung akses anak dari keluarga miskin yang potensial untuk kuliah di PT berkualitas tinggi.
- c. Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Satu Pintu.
- d. Perlu afirmasi beasiswa bagi anak tidak mampu dalam penerimaan mahasiswa baru.
- e. Dukungan terhadap peran PTS dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi dengan pemberian biaya operasional PTS, pembebasan PTS dari Pajak PBB, dan pembatasan Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Mandiri di PTN.
- f. Perlu penyesuaian regulasi terkait pemilihan Rektor di PTN.

B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:

1. Mendorong penguatan mutu perguruan tinggi dengan lebih terukur dan berkesinambungan secara regulasi dan kebijakan.
2. Menghimbau para narasumber agar secara aktif memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk menyempurnakan Kebijakan Perguruan Tinggi dan program turunannya dan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan Pendidikan di Indonesia.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.35 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol *i*